

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Jenis Pajak*. Pajak.Go.Id.
<https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>
- Fitriya. (2024a). *Pajak Penghasilan (PPh) Badan : Tarif dan Contoh Hitung*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
- Fitriya. (2024b). *Pajak Penghasilan Pasal 25 : Tarif, Contoh, Cara Bayar PPh 25*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25/>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk B*.
- Mazidah, A. (2022). *Simak! Ini Dia Ketentuan Tarif PPh Badan Terbaru*. Ortax. <https://ortax.org/simak-ini-dia-ketentuan-tarif-pph-badan-terbaru>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KM.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga*.
- Nurjanah. (2022). *Apa itu Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan?* MUC Surabaya. <https://konsultanpajak-surabaya.com/apa-itu-dinamisasi-angsuran-pph-pasal-25-bagi-wajib-pajak-badan#gsc.tab=0>
- Patric Walandouw. (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. *Emba*, 1(3), 1689–1699.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Perundang-undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Nomor 23 (2017): 1.*
https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
Negara Republi. *Undang-Undang Nomor, 23, 1.*
https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N. 2019(1), 46.*
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia,*

12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

Rioni. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

UU No. 28 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Yulianti, F. (2012). Pajak, Fungsi Pajak, dan Pengertian Pajak. *Molucca Medica*, 11(April), 13–45. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>

